

DAFTAR PUSTAKA

Adapun bahan atau referensi literature atau pustaka yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

A. Buku-Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Anna Yulianti, S. H. (2022). *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Alumni
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Bahri, I. S. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bundaran Hukum.
- Barkatullah, A. H. (2018). *Hukum Perseroan Indonesia*. Nusamedia.
- Chumaida, Z. V., & SH, M. (2021). *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Jakad Media Publishing.
- Diantha, I. M. P. (2015). *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. FH Udayana
- Handayani, L. T. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Hartono, A. P., & SH, M. K. (2021). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Penerbit Alumni.
- Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Kepustakaan Populer. Gramedia.
- Safei Said, 2023**
KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum
 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Ilyas, Amir; Nursal, Muhammad (2022). *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Kencana.
- Iswahyudi, F. (2020). *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Penerbit EnamMedia.
- Jazim Hamidi SH, M. H., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., & Iswara, D. B. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Universitas Brawijaya Press.
- Koibur, M. E., Murdiyanto, A. W., Munawar, Z., Insany, G. P., Manurung, H. E., Karmana, D., ... & Sastradipraja, C. K. (2023). *SAINS DATA: Strategi, Teknik, dan Model Analisis Data*. Kaizen Media Publishing.
- La, O. M., Yulianta, S., Qadriani, A., Abd, R. M., Eric, S. H., Muhamad, S. I., ... & Agus, S. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Media Sains Indonesia.
- Muhaimin.(2020).*Metode Penelitian Hukum*.Mataram University.
- Nugroho, S. S., Sarjiyati, S., & Mohammad Choirul Aanam, S. H. (2021). *Madiun Kota Pendekar Prespektif Kebijakan Wisata Budaya Pencak Silat*. Penerbit Lakeisha
- Poernomowati.(2021).*Hukum Persaingan Usaha (Pemeriksaan Perkara Kartel)*.Jakad Media Publising.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori & Praktek)*.Jakad Publishing Group.
- Putri, R., Rosmalia, D., Sihombing, P. R., Siregar, S., Suardika, I. K., Warsitasari, W. D. & Zahari, M. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto (1989).*Pengantar Penelitian Hukum*.Universitas Indonesia. Jakarta.
- Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana.

Safei Said, 2023

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Swislyn, V. (2020). *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian Pembagian Harta Bersama Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Adat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Syahuri, T. (2011). *Tafsir Konstitusi Sebagai Aspek Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ Plus*. Tanjungpura University Press.
- Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.
- Yuhelson, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo. Ideas Publishing.
- B. Jurnal**
- Annisa, R., Winda, S., Dwisaputro, E., & Isnaini, K. N. (2020). Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 209-224.
- Budisutrisna, B. (2016). Komparasi Teori Kebenaran Mo Tzu Dan Pancasila: Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 1-29.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Kencana.
- Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837-845.
- Hasibuan, A. M. (2022). Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 121-144.
- Safei Said, 2023**
**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
 PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum
 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Hanafi, M. F., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 79-83.

Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 1.

Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.

Purnamasari, G. C. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Veritas et Justitia*, 3(2), 244-269.

Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Pub., h. 1, dikutip dari skripsi dengan judul Pemikiran Prof Satjipto Raharjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia (2016).

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.

Sihombing, E. N. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(1), 95-104.

C. Makalah

Asshiddiqie, J. (2007). Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya. Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta, 27.

Safei Said, 2023

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Mahfud, M. D. (2009). Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
In Jakarta: Seminar Nasional.

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

[Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.](#)

Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 82. Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PPU III/2005.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Safei Said, 2023

***KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Majelis Umum PBB 2200 A (XXI).

E. Koran/Majalah/Internet/Sumber Lainnya

BPJS-Kesehatan (2017). Hak dan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27>.

BPJS Kesehatan (2022). Jawaban Permohonan Permintaan Data Penelitian Tesis. BPJS No.1316/I.2/0123 Tanggal 23 Januari 2023.

Bisnis.Com (2021). Audit BPJS Kesehatan Rampung, Defisit Dana Jaminan Sosial Mulai Berkurang. <https://finansial.bisnis.com/read/20210709/215/1415826/audit-bpjs-kesehatan-rampung-defisit-dana-jaminan-sosial-mulai-berkurang>.

Bisnis.Tempo.(2021). Bos BPJS Kesehatan Soal Surplus di 2021: Bersyukur, Meski Belum Sehat Sekali. https://bisnis.tempo.co/read/1551951/bos-bpjs-kesehatan-soal-surplus-di-2021-bersyukur-meski-belum-sehat-sekali?page_num=2.

CNN Indonesia.(2020). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201228115355-78-586921/iuran-bpjs-kesehatan-naik-potensi-tunggakan-makin-gemuk>.

Fachmi Idris. (2019). Strategi Bauran Kebijakan, Jaga Kestinambungan Program Jaminan Kesehatan. Media BPJS Kesehatan Edisi 79.

Hukumonline. (2010). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>.

Kompas.com (2020). BPJS Kesehatan, Defisit Sejak Awal hingga Rencana Penghapusan Kelas. <https://money.kompas.com/read/2020/06/12/111300426/bpjs-kesehatan-defisit-sejak-awal-hingga-rencana-penghapusan-kelas?page=all>.

Media Indonesia.(2019). <https://mediaindonesia.com/humaniora/237649/peserta-penerima-bukan-penerima-upah-belum-patuh-bayar-iuran-bpjs.html>.

Safei Said, 2023

KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Metode Penelitian Hukum. Universitas Tarumanegara. Diakses tanggal 6 April 2023 pada <https://www.studocu.com/id/document/universitas-tarumanagara/metode-penelitian-hukum/metode-penelitian-hukum/47507369>.

Nasional Kontan. (2022). <https://nasional.kontan.co.id/news/iuran-menunggak-bpjs-kesehatan-beberkan-cara-melunasinya>.

Prof.Dr.Alvi Syahrin (2014). Fungsi Penelitian Hukum.
<http://alviprofdr.blogspot.com/2014/02/penelitian-hukum-fungsi.html>.

A Garner, Black's Law Dictionary.

Kamus Baku Bahasa Indonesia (KBBI).

Safei Said, 2023

***KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]